



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

RENJA
2024



RENCANA KERJA

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jl. Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi
Kode Pos 58114 Telp. (0292) 421193
email: dpmptsp@grobogan.go.id
website: <https://dpmptsp.grobogan.go.id/>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dapat selesai sesuai waktu. Renja ini disusun berdasarkan evaluasi Renja terdahulu untuk penyelarasan program dan kegiatan dengan RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Grobogan, yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih Tahun 2024. Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ke depan. Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang.

Purwodadi, 25 Juli 2023

Kepala Dinas Penanama Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan



Drs. ARIES PONCO WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199403 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pokok.....	8
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	13
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	14
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	15
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	19
4.1 Sumber Dana, Sumber Daya dan Perkiraan Maju.....	19
 BAB V PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s.d Tahun 2023 Kabupaten Grobogan.....	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.....	8
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan	10
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	14
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	17
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Grobogan.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026.

Perumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja Tahun 2024 juga dirumus untuk mensinkronkan serta menunjang visi, misi kepala daerah pada Tahun 2024 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengakomodir urusan Penanaman Modal.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2024 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada Tahun 2024.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat visi, misi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Tugas Pokok :

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- b. Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- d. Pengoordinasian tim teknis;

- e. Pelaksanaan pelayanan perizinan;
- f. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Disamping itu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ini di maksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan untuk memantapkan dan sebagai pedoman terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi serta untuk memberikan gambaran arah kebijakan, sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran' Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026;
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Memuat Rencana Kerja Tahun 2024 dan pendanaan Tahun 2023 berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra

Berdasar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja, untuk program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2022 yang berorientasi pada Urusan Wajib Penanaman Modal dengan target capaian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah 100%, perkiraan target capaian Renja Tahun 2023 adalah 100%.

Secara umum Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan telah dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2021-2026 serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan 2021-2026 untuk mewujudkan Misi 3 dan 4, tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 serta 2 Sasaran strategis dengan indikator sasaran strategis sejumlah 3 indikator sasaran. Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DPMPTSP
s.d Tahun 2023 Kabupaten Grobogan

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2 18 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2 18 01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11=(10/4)
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor	375	255	360	4.689	1.303%	360 investor	360 investor	100%
2 18 02 2,01	Penetapan Pemberian fasilitas/ Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi pelaku usaha	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2 18 02 2,02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 03 2,01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi LOI dari jumlah LOI yang masuk	20%	0	10 %	16,67%	166,7 %	20%	20%	100%
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 04 2,01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	75,94%	55,56%	75,81%	51,76%	68%	75,81%	75,81%	100%
2 18 05 2,01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	824	621	796	412	52%	824	824	100%
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data untuk masing-masing perizinan	59,21%	32,88%	46,05%	46,05%	100%	46,05%	46,05%	100%
2 18 06 2,01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	45	25	35	35	100%	35	35	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1)	Nilai investasi di daerah	Miliar Rp	734,358	771,075	817,340	870,467	2.568,765	8.658,007	9.000	9.500	
2)	Rata-rata nilai IKM	Nilai	79	79,5	80	80,5	80,32	80,52	80,72	80,92	
3)	Nilai SAKIP	Nilai	70,6	70,7	70,8	70,9	70,6	-	70,8	70,9	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, merupakan organisasi perangkat daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tantangan sebagai berikut :

- 1) Banyaknya pelaku usaha di lingkungan Kab. Grobogan yang belum memiliki serta memahami pentingnya perizinan berusaha (NIB) sebagai legal formal dan kepastian hukum, khususnya pelaku usaha mikro;

- 2) Adanya pelaku usaha yang belum migrasi ke OSS-RBA serta ketidaktahuan pelaku usaha akan kewajiban lapor ke LKPM;
- 3) Kurang maksimalnya promosi/penyediaan informasi peluang usaha penanaman modal di Kabupaten Grobogan;
- 4) Kurangnya kajian-kajian potensi dan peta potensi yang ada di Kabupaten Grobogan;
- 5) Masih kurangnya ketepatan pelaksanaan SOP pelayanan perizinan;
- 6) Kurang maksimalnya koordinasi dengan OPD Teknis;
- 7) Terbatasnya anggaran daerah untuk membiayai program dan kegiatan.

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan Terintegrasi dalam Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi Grobogan yang menyediakan pelayanan dengan cepat dan mudah;
- 2) Inovasi “Jempol Premium” (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Usaha Mikro) hadir pada hari libur di CFD (Car Free Day) serta kedepan akan hadir ke pelosok Desa dan Kecamatan di Kabupaten Grobogan;
- 3) Pemetaan wilayah potensi investasi yang dilakukan untuk memberi peluang besar bagi investor;
- 4) Potensi pengembangan Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Minat investasi di kawasan strategis ekonomi Kabupaten dan kawasan peruntukan industri;
- 6) Penerapan Sistem OSS (Online Single Submission)/pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan prima;
- 7) Potensi kawasan Wisata di Kabupaten Grobogan yang terus dikembangkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan tahun 2024 disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kabupaten Grobogan	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	7.946.014,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Grobogan	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100%	7.946.014,5	
			Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100%				Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100%		
			Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100%				Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	164.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	164.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	4.169.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	4.169.100	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	56.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	100%	56.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	271.945	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	271.945	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.291.766	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.291.766	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	378.859	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	378.859	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	850.314,5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	850.314,5	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	764.030	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Grobogan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	764.030	
2)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kabupaten Grobogan	Jumlah investor	375 investor	209.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Grobogan	Jumlah investor	375 investor	209.000	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi pelaku usaha	1 kegiatan	24.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi pelaku usaha	1 kegiatan	24.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	2 dokumen	185.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	2 dokumen	185.000	
3)	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Grobogan	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	100%	217.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Grobogan	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	100%	217.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Persentase realisasi LOI dari jumlah LOI yang masuk	20%	217.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Persentase realisasi LOI dari jumlah LOI yang masuk	20%	217.000	
4)	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kabupaten Grobogan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	161.500	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Grobogan	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	161.500	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	1885 pelaku usaha	161.500	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	1885 pelaku usaha	161.500	
5)	PROGRAM PENGENDALIAN	Kabupaten Grobogan	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	75,94%	344.300	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kab. Grobogan	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	75,94%	344.300	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	381 orang	344.300	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	381 orang	344.300	
6)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kabupaten Grobogan	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perizinan	59,21%	50.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Grobogan	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perizinan	59,21%	50.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	50.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Grobogan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	50.000	
Total					8.927.814,5					8.927.814,5	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan mekanisme perencanaan, usulan kegiatan dimulai dari musyawarah di tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten. Demikian juga pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga melalui mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bukan OPD yang membidangi kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan umum masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jarang sekali menerima usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam hasil musrenbang maupun forum musyawarah lainnya. Dengan demikian usulan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih pada mewujudkan program yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan infrastruktur, dan energy. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM), Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal

Visi dan misi sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stakeholder maupun masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan terhadap Renstra BKPM beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Kebijakan Nasional	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebijakan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, dengan mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif. Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal dan Penguatan daya saing perekonomian nasional.	Belum semua potensi investasi dibuat studi kelayakan, Belum optimalnya kuantitas dan kualitas promosi penanaman modal. Kurang maksimalnya kajian potensi dan promosi/penyediaan informasi peluang penanaman modal Keterbatasan lahan investasi	Kurang optimalnya pemetaan penanaman modal. Keterbatasan lahan untuk investasi Tingginya harga lahan untuk investasi Kepastian tata ruang untuk investasi	Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Banyaknya investor yang berminat menanamkan modalnya di Grobogan Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerima investor

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan tidak terlepas dari Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. Tujuan dan sasaran Renja tidak berbeda dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, karena tujuan dan sasaran Renja merupakan Implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Visi yang ingin di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **“Terwujudnya Grobogan yang lebih sejahtera , berdaya saing, beriman dan berbudaya”**.

Untuk mencapai visi tersebut, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan mengarah pada pencapaian misi sebagai berikut:

Misi 3 : Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing, dan

Misi 4 : Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing dengan tujuan meningkatkan daya tarik investasi berskala nasional dan pelayanan perizinan yang optimal serta sasarannya meningkatnya jumlah nilai investasi.

Adapun strateginya adalah mengembangkan Potensi dan Peluang Penanaman Modal yang Kondusif, memperluas Penyebaran Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal, Mengoptimalkan Pengendalian dan Pengolahan data Penanaman Modal, Memberikan jaminan kepastian pelayanan dan transparan.

Arah Kebijakan yang diinginkan menjangkau peminatan investor, Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan diregulasi Penanaman Modal, Pembaharuan (updating) peta potensi sektor prioritas dan promosi investasi, Mengembangkan Promosi Penanaman Modal, Melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Meningkatkan Kualitas Pengolahan data dan informasi Penanaman Modal, Pemenuhan dan Pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan, Menyusun dan mengimplementasikan SP dan SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, serta mempermudah prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Misi memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik dengan tujuan meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah, dengan sasaran meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

Adapun Strateginya meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan dukungan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik. Arah kebijakannya adalah Penyediaan sarana dan prasarana serta SDM penunjang pelayanan Mal Pelayanan Publik Grobogan yang berkualitas.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran 2024	Strategi	Kebijakan	Program
Meningkatkan daya tarik investasi berskala nasional dan pelayanan perizinan yang optimal		Nilai investasi di daerah	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun N	Rp (miliar)	870,468	Mengembangkan Potensi dan Peluang Penanaman Modal yang Kondusif	Menjaring peminatan investor	
	Meningkatnya jumlah nilai investasi	Jumlah Investasi PMDN/PMA	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun N	Rp (miliar)	870,468		Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan diregulasi Penanaman Modal	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Perangkat Daerah		IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	nilai	80,50			
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan	nilai	70,90			

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
					2024			
	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai IKM adalah hasil penilaian masyarakat yang mendapatkan layanan di perangkat daerah dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan oleh KemenPAN-RB	nilai	80,50	Memperluas Penyebaran Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Pembaharuan (updating) peta potensi sektor prioritas dan promosi investasi.	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan	nilai	70,90		Mengembangkan Promosi Penanaman Modal	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
						Mengoptimalkan Pengendalian dan Pengolahan data Penanaman Modal	Melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
							Meningkatkan Kualitas Pengolahan data dan informasi Penanaman Modal	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 SUMBER DANA, SUMBER DAYA DAN PERKIRAAN MAJU

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan.

Guna Pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024, maka dibutuhkan sumber dana. Dana yang dibutuhkan dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPSTP Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Grobogan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								7.310.451.750
2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	Kab. Grobogan	100%	6.388.475.000	DAU		100%	6.707.898.750
					Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	Kab. Grobogan	100%				100%	
					Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Kab. Grobogan	100%				100%	
2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	Kab. Grobogan	100%	62.500.000	DAU		100%	65.625.000
2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	3.979.135.000	DAU		100%	4.178.091.750
2	18	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Kab. Grobogan	100%	18.000.000	DAU		100%	18.900.000
2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	141.307.000	DAU		100%	148.372.350
2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Grobogan	100%	898.202.000	DAU		100%	943.112.100
2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Kab. Grobogan	100%	57.217.000	DAU		100%	60.077.850
2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Grobogan	100%	732.140.000	DAU		100%	768.747.000
2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Grobogan	100%	499.974.000	DAU		100%	524.972.700

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor	Kab. Grobogan	375 investor	52.700.000	DAU		420 investor	55.335.000
2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal bagi pelaku usaha	Kab. Grobogan	1 kegiatan	52.700.000	DAU		1 kegiatan	55.335.000
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	Kab. Grobogan	100%	74.550.000	DAU		100%	78.227.500
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi LOI dari jumlah LOI yang masuk	Kab. Grobogan	20%	74.550.000	DAU		30%	78.227.500
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan	Kab. Grobogan	100%	72.310.000	DAU		100%	75.925.500
2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	Kab. Grobogan	1885 pelaku usaha	72.310.000	DAU		1885 pelaku usaha	75.925.500
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	Kab. Grobogan	75,94%	344.300.000	DAK		76,05%	361.515.000
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Kab. Grobogan	381 orang	344.300.000	DAK		381 orang	361.515.000
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perizinan	Kab. Grobogan	59,21%	30.000.000	DAU		85,53%	31.500.000
2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Grobogan	1 dokumen	30.000.000	DAU		1 dokumen	31.500.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Grobogan dengan mengacu RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024. Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas Tahun 2024 yang merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib Penanaman Modal.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Grobogan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Grobogan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Grobogan, melalui pemberian dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan Tahun 2024, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Purwodadi, 25 Juli 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN



Drs. ARIES PONCO WIBOWO

Pembina Utama Muda
NIP 19650130 199403 1 002